



► Laporan Singkat Penelitian

Mei 2023

Upah digital untuk pekerjaan layak di Indonesia Kajian cepat

Poin-poin utama

- Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan menuju pembayaran upah digital yang bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia telah mendukung pengembangan infrastruktur digital dan telah mempromosikan lingkungan regulasi yang memungkinkan untuk layanan keuangan digital, perlindungan konsumen, dan literasi keuangan.
- Pekerja yang masih menerima upah secara tunai mengakui manfaat transisi ke pembayaran upah digital. Di antara tantangannya, para pekerja melaporkan hal-hal terkait aksesibilitas, keamanan, dan biaya yang tinggi.
- Perusahaan lebih memilih untuk membayar upah secara digital jika kondisinya kondusif. Faktor relevan yang mempengaruhi transisi ini adalah terkait besarnya, frekuensi pembayaran upah, penggunaan uang tunai untuk transaksi dengan konsumen, resistensi pekerja, dan infrastruktur digital.
- Penyedia layanan keuangan berusaha mengembangkan produk yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, terutama terkait layanan penggajian. Namun, layanan kepada perusahaan yang lebih kecil dan pekerjanya, hal yang dapat diperbaiki adalah terkait biaya jasa, biaya transaksi, dan akses ke infrastruktur keuangan.

Pengantar

Ketika diterapkan secara bertanggung jawab¹, pembayaran upah digital – melalui rekening bank, dompet uang seluler, atau kartu prabayar – dapat menguntungkan pekerja dan perusahaan serta berkontribusi pada tujuan-tujuan kebijakan publik. Upah digital dapat mendorong efisiensi, pertumbuhan, transparansi, kondisi kerja yang lebih baik, dan akses ke layanan dan pasar. Transisi ini juga berpotensi membantu pekerja, terutama yang paling rentan, untuk memiliki

kendali lebih besar atas upah mereka dan kemampuan mengakses layanan keuangan formal. Namun, transisi dari upah secara tunai ke upah digital yang bertanggung jawab masih menghadirkan tantangan bagi perusahaan, pekerja, regulator, dan sektor keuangan, termasuk keterbatasan infrastruktur keuangan dan kebutuhan perusahaan dan pekerja untuk mengadopsi sistem dan alat baru.

Pusat Global Upah Digital ILO untuk Pekerjaan Layak dan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial (LPEM-FEB UI)

¹ Pembayaran upah digital yang bertanggung jawab mematuhi Prinsip PBB untuk Pembayaran Digital yang Bertanggung Jawab dan menghormati hak-hak pekerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk prinsip dan hak dasar di tempat kerja dan

standar ketenagakerjaan internasional yang relevan. Untuk informasi lebih lanjut tentang pembayaran upah digital yang bertanggung jawab, lihat [Laporan singkat ILO tentang Mempromosikan Pembayaran Upah Digital yang Bertanggung Jawab](#).

melakukan kajian cepat untuk menganalisis potensi pembayaran upah digital yang bertanggung jawab di Indonesia, dengan fokus pada usaha kecil dan menengah di sektor garmen dan ritel. Kajian ini akan terdiri dari tinjauan pustaka dan analisis data sekunder; wawancara dengan pemangku kepentingan utama, termasuk dari lembaga pemerintah, penyedia layanan keuangan dan pengupahan, serta organisasi pengusaha dan pekerja; dan wawancara dengan sampel perusahaan dan pekerja di kedua sektor tersebut. Data dikumpulkan dan dianalisis dari 21 perusahaan (12 di sektor garmen dan sembilan di sektor ritel) dan 110 pekerja (55% perempuan). Secara geografis, pekerja yang diwawancarai berada di Jawa Barat (42%), Banten (31%), Sumatera Barat (11%), Sulawesi Selatan (11%) dan Jawa Timur atau Jakarta (4%).

Kajian ini adalah yang pertama yang didedikasikan untuk mengeksplorasi prospek pembayaran upah digital yang bertanggung jawab di Indonesia. Mengingat ukuran sampel yang terbatas, penilaian ini tidak membahas semua permasalahan dan tidak sepenuhnya mewakili kondisi pembayaran upah digital saat ini untuk seluruh Indonesia, namun menyajikan sudut pandang yang berbeda dan memberikan wawasan untuk menginformasikan upaya transformasi digital yang bertanggung jawab atas pembayaran upah di dalam negeri.

Temuan Utama

Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan menuju promosi pembayaran upah digital yang bertanggung jawab

Transformasi digital menjadi prioritas kebijakan Pemerintah Indonesia. Meskipun referensi eksplisit untuk pembayaran upah digital yang bertanggung jawab belum menjadi fitur yang menonjol dalam dialog kebijakan, kemajuan yang signifikan telah dibuat untuk mempromosikannya. Inisiatif Kantor Presiden, legislatif, Pemerintah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Tenaga Kerja, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika, antara lain, telah memberikan kontribusi terhadap kemajuan tersebut. Promosi pembayaran upah digital yang bertanggung jawab mewarnai pertemuan berbagai prioritas kebijakan terkait pembayaran upah, pembayaran digital,

perlindungan konsumen, inklusi keuangan, literasi keuangan, dan inovasi keuangan digital.



Ada dorongan dari pemerintah, termasuk komitmen Presiden untuk mencanangkan transformasi digital. Presiden meminta setiap provinsi memiliki tim untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi keuangan daerah.

► Perwakilan, Bank Indonesia

Mengatasi defisit infrastruktur telah menjadi prioritas bagi Pemerintah. Untuk meningkatkan infrastruktur konektivitas digital, khususnya di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T), inisiatif yang menonjol tersebut antara lain adalah Proyek Palapa Ring dan Proyek Satelit Multifungsi SATRIA. Pemerintah bergabung dengan Aliansi Better than Cash yang berbasis di PBB pada tahun 2017, yang mencerminkan komitmennya untuk mempromosikan pembayaran digital yang bertanggung jawab. Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia 2025 berupaya memberikan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan ekonomi dan keuangan digital di tanah air. Inisiatif lain yang relevan oleh Bank Indonesia termasuk Fitur Antarmuka Pembayaran Terpadu (IPT), Gerbang Pembayaran Nasional / GPN, dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk mendukung sistem pembayaran ritel Indonesia. Mengingat kurangnya cabang bank di banyak daerah pedesaan dan biaya transaksi yang tinggi, Pemerintah menganut model perbankan keagenan, *Laku Pandai*, untuk mempromosikan inklusi keuangan. Menyikapi pandemi COVID-19, program percepatan dan perluasan digitalisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan satuan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bentukan Bank Indonesia turut berkontribusi dalam transformasi digital daerah. dan transaksi pemerintah daerah.

Pembayaran upah digital yang bertanggung jawab berkontribusi pada inklusi keuangan dan pekerjaan layak

Perhatian yang lebih besar terhadap kekhususan pembayaran upah dapat semakin mempercepat transformasi digital pembayaran di Indonesia dan kemajuan upah yang adil dan layak dengan cara yang menguntungkan pekerja, perusahaan, pemerintah dan

masyarakat pada umumnya. Pada tahun 2022, sekitar 42,3 juta laki-laki dan 20,6 juta perempuan adalah pencari nafkah di Indonesia, 35 persen di antaranya berada di pedesaan.² Di seluruh dunia, menerima pembayaran upah secara digital seringkali menjadi alasan untuk membuka rekening bank. Menurut Bank Dunia, pada tahun 2021, sekitar satu dari enam orang yang berusia di atas 15 tahun di Indonesia telah membuka rekening lembaga keuangan pertama mereka untuk menerima pembayaran upah, dan jumlah yang hampir sama juga melakukannya untuk menerima uang dari pemerintah.³ Menyikapi pandemi COVID-19, Kementerian Tenaga Kerja berupaya memastikan pembayaran tunjangan subsidi upah secara digital melalui bank-bank milik negara kepada pekerja yang menerima kurang dari upah minimum yang berlaku, dengan menggunakan data dari BPJS untuk mengidentifikasi pekerja yang memenuhi syarat. Kemnaker juga telah mengembangkan ekosistem ketenagakerjaan digital, Siapkerja, yang terintegrasi dengan berbagai layanan untuk pekerja dan pemberi kerja. Menurut Kementerian ini, Siapkerja akan memungkinkan transparansi upah yang lebih besar, sehingga pekerja lebih tahu apa yang harus mereka bayar, dan data yang mendasarinya dapat memberi informasi terkait analisis dan intervensi Kementerian.

Pondasi kerangka hukum dan kebijakan untuk mempromosikan pembayaran upah digital yang bertanggung jawab di negara ini sudah ada. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 mengatur bahwa upah dapat dibayarkan kepada pekerja melalui bank, dalam hal ini harus dapat dicairkan oleh pekerja pada tanggal pembayaran yang disepakati. Sebagai pembayaran digital, pembayaran upah digital yang bertanggung jawab di Indonesia harus sejalan dengan ketentuan perlindungan konsumen yang relevan. Ketujuh prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia sangat relevan (Kotak 1).

▶ Kotak 1: Prinsip Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

- ▶ Kesetaraan dan perlakuan yang adil
- ▶ Pengungkapan dan transparansi
- ▶ Pendidikan dan literasi
- ▶ Perilaku bisnis yang akuntabel
- ▶ Perlindungan aset konsumen terhadap penyalahgunaan
- ▶ Perlindungan data dan/atau informasi konsumen, dan
- ▶ Penanganan dan penyelesaian pengaduan secara efektif

Sumber: Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berkontribusi dalam perlindungan konsumen melalui pengaturan layanan keuangan digital dan sosialisasi literasi keuangan. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2019, indeks literasi keuangan di Indonesia sebesar 38,0%⁴. Pendidikan keuangan adalah alat penting untuk memungkinkan adopsi dan penggunaan efektif dari pembayaran upah digital dan layanan keuangan terkait. OJK telah menetapkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 – 2025 yang mengoordinasikan inisiatif untuk meningkatkan penggunaan produk dan layanan keuangan yang tepat guna di Indonesia.

Pekerja mengakui manfaat pembayaran upah digital tetapi seringkali kekurangan kesempatan dan kapasitas untuk menikmatinya

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, banyak pekerja yang saat ini menerima upah secara tunai memiliki ketertarikan untuk beralih ke pembayaran upah secara digital. Alasannya termasuk kemudahan penggunaan, keamanan, dan memudahkan menabung. Namun, pemberi kerja seringkali tidak mengizinkan pekerja untuk memilih metode pembayaran upah mereka. Selain itu, pekerja yang lebih suka menerima upah secara tunai seringkali tidak memiliki rekening tabungan dan kesulitan untuk membayar pengeluaran rutin mereka secara digital

²ILO, 2023, ILOSTAT, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional 2022.

³ Demirgüç-Kunt dkk 2022.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2019. [Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia \(SNLKI\) 2021 – 2025](#).

di mana vendor tidak dilengkapi dengan transaksi digital. Selain itu, masih banyak pekerja yang khawatir tentang kesulitan terkait dengan terbatasnya akses Anjungan Tunai Mandiri (ATM), akses internet yang terbatas, masalah teknis, penipuan data dan masalah keamanan, biaya transaksi dan beban biaya terkait. Yang lain khawatir bahwa mereka belum memiliki literasi digital dan keuangan yang memadai.

▶ Dari sudut pandang saya, pembayaran upah secara digital lebih aman dan efektif daripada pembayaran secara tunai. Namun demikian, saya khawatir harus membayar biaya administrasi bank yang banyak.

▶ Pekerja perempuan dibayar secara tunai, ritel

Pekerja juga menghadapi tantangan untuk mendapatkan manfaat penuh dari layanan keuangan. Beberapa pekerja yang diwawancarai memiliki simpanan atau pinjaman di bank atau lembaga keuangan mikro. Sumber pinjaman yang paling signifikan adalah dari keluarga, kerabat, dan teman. Dalam hal transaksi harian, sebagian besar pekerja melaporkan pembayaran pengeluaran menggunakan uang tunai. Bahkan pekerja yang menerima pembayaran upah digital menyatakan keraguan tentang cara menggunakan layanan keuangan, terutama tentang akses ke rekening bank menggunakan ponsel, kerahasiaan data, dan tabungan. Namun, mereka menganggap lebih mudah untuk menabung sebagian dari upah mereka jika dibayar secara digital.

▶ Saya puas dengan pembayaran digital karena lebih mudah untuk menabung. Jika uang diberikan dalam bentuk tunai, selalu ada kemungkinan membelanjakannya untuk kebutuhan yang tidak perlu.

▶ Pekerja perempuan dibayar secara digital, ritel

Defisit pekerjaan layak utama yang patut mendapat perhatian lebih besar adalah kurangnya slip gaji yang memadai untuk sejumlah besar pekerja. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 mewajibkan pemberi kerja untuk memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima pekerja pada saat pembayaran upah. Namun, di antara 110 pekerja yang diwawancarai, hampir setengahnya tidak menerima slip gaji, sebagian besar juga tidak memiliki kontrak tertulis.

Untuk sebagian besar pekerja yang menerima slip gaji, slip gaji tersebut ditulis tangan. Slip gaji adalah langkah utama dalam perlindungan upah, terlepas bagaimana upah dibayarkan. Jika pembayaran upah dilakukan secara tunai, pemberian slip gaji yang memadai dapat menjadi faktor pendukung yang penting untuk digitalisasi. Ini mendukung formalisasi proses pengupahan dan hubungan kerja, dan bukti yang dihasilkannya juga meningkatkan kemampuan perusahaan dan pekerja untuk mengakses layanan keuangan. Transisi ke pembayaran upah digital mendukung peluang untuk menghasilkan dan mengakses slip gaji dengan rincian secara daring.

Untuk organisasi pekerja, manfaatnya meliputi transparansi, yang berpotensi memberikan jaminan terhadap pencurian upah, dan memudahkan pembayaran iuran serikat pekerja, yang dapat dipotong secara otomatis dari gaji pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja. Meskipun mengakui manfaatnya, organisasi pekerja Indonesia masih belum secara aktif mengadvokasi pembayaran upah digital yang bertanggung jawab. Saat ini, mereka masih lebih fokus untuk meminimalkan dampak pandemi terhadap pekerjaan pekerja, seperti cuti dan PHK, serta meningkatkan upah minimum agar pekerja yang bekerja memiliki standar hidup yang layak. Secara umum, organisasi pekerja mendukung pembayaran upah dengan cara yang menjamin kepuasan pekerja.

▶ Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkadang masih dibayar secara tunai, meskipun harus dibayar melalui transfer bank. Namun jika mereka bekerja di daerah yang minim infrastruktur, sulit untuk membayar upah secara digital.

▶ Kementerian Tenaga Kerja, Indonesia

Peningkatan kapasitas dan motivasi pekerja untuk menerima upah mereka secara digital dengan demikian perlu adanya dukungan kepada mereka untuk membuka rekening dan mengembangkan literasi digital dan keuangan mereka serta memastikan bahwa infrastruktur dan layanan keuangan yang tersedia dapat membantu pekerja untuk mengakses dan membelanjakan upah mereka dengan mudah, aman, andal, dan dengan cara yang terjangkau.

Pemberi kerja biasanya lebih suka membayar upah secara digital, tetapi menghadapi beberapa tantangan

Di antara 21 perusahaan yang diwawancarai, sebagian besar perusahaan hanya menggunakan uang tunai sebagai metode pembayaran upah mereka dan yang lainnya membayar upah baik secara tunai maupun digital. Sebagian kecil telah beralih ke pembayaran upah digital. Menurut organisasi pengusaha yang diwawancarai,⁵ perusahaan yang membayar pekerjaannya secara tunai seringkali berada di daerah terpencil yang kekurangan infrastruktur digital dan keuangan yang memadai atau terlalu kecil untuk melakukan transisi ke pembayaran upah digital sehingga tidak terlalu menarik bagi mereka. Wawancara dengan perusahaan menunjukkan bahwa mereka yang memiliki kurang dari 10 pekerja seringkali membayar pekerjaannya secara tunai. Bagi pemilik usaha ritel dengan enam pekerja, misalnya, penghitungan dan pencairan upah secara tunai membutuhkan waktu kurang dari satu jam. Sebaliknya, sebuah perusahaan dengan 30 pekerja dapat menghabiskan lebih dari 16 jam, dikerjakan dalam dua waktu hari, untuk memproses pembayaran upah secara tunai.

► Kami menyadari bahwa perusahaan kami menghabiskan banyak waktu untuk menghitung gaji secara tunai. Oleh karena itu, kami bertransisi ke pembayaran upah digital karena membantu efektivitas kinerja perusahaan.

► Pengusaha perempuan, garmen

Selain ukuran perusahaan, pertimbangan penting dari sudut pandang pemberi kerja mencakup frekuensi pembayaran upah, cara perusahaan menerima pembayaran, dan keengganan dari pekerja. Misalnya, perusahaan yang membayar pekerja seminggu sekali akan terkena biaya transaksi empat kali lipat, dengan biaya yang akan semakin tinggi jika pekerja memiliki rekening di bank yang berbeda dengan bank perusahaan atau pemilik usaha. Untuk perusahaan yang membayar pekerja setiap hari, biaya transaksi membuat pembayaran upah digital menjadi mahal.



Sesuai dengan kondisi usaha saya saat ini, menurut saya menerapkan upah digital tidak akan lebih murah dibandingkan metode tunai. Meskipun menurut saya ini akan lebih efisien waktu.

► Perempuan dan laki-laki pemilik usaha, ritel

Dalam hal pembayaran yang diterima oleh perusahaan, perusahaan yang menangani uang tunai dalam jumlah besar cenderung lebih suka membayar upah secara tunai. Sebaliknya, usaha di mana konsumen membayar secara digital kemungkinan besar akan membayar pekerjaannya secara digital karena mereka tidak memiliki cukup uang tunai untuk membayar upah. Dengan tidak adanya infrastruktur yang kondusif, layanan keuangan yang inklusif, dan literasi digital dan keuangan yang memadai bagi pekerja, keengganan pekerja dapat mempengaruhi keputusan pengusaha untuk beralih ke pembayaran upah digital.

Penyedia keuangan sudah menawarkan layanan penggajian tetapi masih perlu lebih diperbaiki disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kecil dan pekerja

Penyedia jasa keuangan, termasuk bank dan penyedia uang elektronik, berusaha untuk lebih merespon kebutuhan usaha kecil dan menengah (UKM) dan pekerjaannya dalam mengadopsi digitalisasi upah. Dalam kasus UKM, ada inisiatif terkait penggunaan digital yang mungkin dapat mendukung transisi ke pembayaran upah digital, sebagaimana dijelaskan di Kotak 2.

Bank memiliki beberapa layanan penggajian yang dapat dimanfaatkan UKM, dan beberapa telah mengembangkan solusi e-payroll (penggajian-elektronik) yang disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran upah mereka. Penyedia uang elektronik juga menawarkan layanan transfer yang dapat digunakan UKM untuk membayar upah. Layanan bank yang terkait dengan pembayaran upah antara lain layanan penggajian dan internet banking. Dalam sebuah wawancara, penyedia layanan keuangan menyarankan agar bisnis dengan kurang dari lima pekerja mungkin merasa lebih mudah dan lebih cepat untuk membayar

⁵ Organisasi pengusaha yang diwawancarai adalah: Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta.

upah menggunakan internet atau mobile banking tanpa menggunakan layanan penggajian.

Digitalisasi akan mempermudah proses transaksi, memantau, bahkan memberikan bantuan [untuk usaha mikro, kecil, dan menengah]. Bank harus menjadi garda terdepan dalam digitalisasi transaksi.

► Perwakilan dari bank komersial

Perusahaan yang mendaftar untuk layanan penggajian memberi bank informasi tentang pekerja dan waktu pembayaran upah dan memperbarui basis data setiap bulan sebelum hari gaji. Penyedia layanan penggajian dapat menawarkan pelatihan dan bantuan teknis untuk mendukung transisi ini dan berbagai jenis layanan kepada perusahaan yang bervariasi dalam hal jangkauan digitalisasi. Layanan dapat bervariasi dari bantuan langsung hingga penggunaan aplikasi daring untuk kredit upah pekerja.

Dari sudut pandang pekerja, layanan penggajian biasanya mensyaratkan mereka untuk memiliki rekening di bank pemberi kerja, tetapi memungkinkan mereka untuk menerima upah di bank lain, walaupun mungkin ada biaya transaksi yang lebih tinggi. Ketentuan bank tentang saldo minimum dan biaya terkait dengan administrasi rekening dan transaksi dapat menghambat adopsi oleh pekerja, terutama di kalangan pekerja perempuan berupah rendah. Misalnya, salah satu bank swasta terbesar di Indonesia mensyaratkan saldo minimal Rp 500.000 (USD 33) untuk dapat mempertahankan rekening mereka, yang dianggap cukup besar karena, dalam beberapa kasus, jumlah ini kira-kira sama dengan 25% dari gaji. Selain itu, biaya yang terkait dengan akses fisik ke titik pembayaran tunai, seperti biaya transportasi dan biaya parkir, serta waktu yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi, juga menjadi kendala yang harus diatasi.

Kami membutuhkan platform sumber daya manusia (SDM) digital untuk mengelola pekerja sebagai pendukung transisi sepenuhnya ke upah digital. Pengaturan yang wajar terkait data karyawan diperlukan sebelum sepenuhnya beralih ke pembayaran upah digital.

► Perwakilan dari penyedia layanan penggajian

Meskipun sudah ada penyedia layanan keuangan yang menawarkan alternatif uang elektronik (e-money) untuk pembayaran upah, lingkungan peraturan saat ini masih belum mendukung. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tidak mengatur tentang pembayaran upah melalui e-money. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik mengatur batas maksimal nilai uang elektronik yang disimpan pada tingkat yang lebih rendah dari upah yang diterima sebagian besar pekerja. Ada juga biaya transaksi untuk isi ulang e-money melalui bank dan biaya penarikan dan transfer bervariasi di seluruh platform.

► Kotak 2: Pengaktifan Digitalisasi UKM di Indonesia

Pengaktifan digitalisasi UKM adalah aspek utama dari transisi pembayaran gaji secara tunai ke digital, yang membutuhkan dukungan dari pemerintah dan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan dari penyedia layanan keuangan.

Bank Indonesia telah mencanangkan beberapa inisiatif untuk mempercepat digitalisasi pembayaran oleh UKM:

- UMKM Go Digital berfokus untuk mendukung UKM onboarding (pengaktifan digitalisasi) pada platform e-commerce.
- UMKM Go Ekspor membantu UKM dalam memenuhi kebutuhan digital pasar ekspor.
- QRIS memungkinkan UKM menawarkan metode pembayaran digital kepada konsumen menggunakan kode QR.
- BI-FAST memungkinkan transaksi lebih cepat, mudah, dan aman menggunakan nomor telepon konsumen sebagai alternatif nomor rekening. Konsumen dikenakan biaya maksimal USD 0,18 oleh penyedia keuangan per transaksi.

Penyedia jasa keuangan telah menjadi aktor yang relevan dalam mempromosikan QRIS dan BI-FAST sebagai solusi yang lebih ekonomis bagi UKM. Menurut Bank Indonesia, QRIS telah diadopsi oleh 13 juta UKM pada tahun 2021.

Kesimpulan

Seperti yang disarankan oleh temuan kajian, ada kebutuhan untuk dialog sosial dengan perwakilan lembaga pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja

serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk dari penyedia layanan keuangan, tentang cara mempromosikan pembayaran upah digital yang bertanggung jawab di berbagai tingkatan. Perhatian khusus harus diberikan pada sektor-sektor di mana perempuan lebih terwakili, seperti garmen dan ritel, serta pertimbangan mengenai tantangan spesifik UKM seiring dengan transisi dari uang tunai ke pembayaran upah digital yang bertanggung jawab.

Untuk perusahaan, ada tantangan yang relevan tergantung pada ukuran, frekuensi pembayaran, dan penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan lainnya, tetapi transisi ke upah digital terbukti lebih efektif dan memakan waktu lebih sedikit. Perusahaan harus didukung dalam memahami manfaat transisi dan langkah-langkah menuju digitalisasi upah. Aspek penting yang penting dicatat dalam kajian ini adalah penggunaan slip gaji yang memadai dan perannya dalam formalisasi proses pembayaran upah.

Penyedia jasa keuangan harus berusaha untuk menyesuaikan layanan mereka dengan lebih baik untuk perusahaan yang lebih kecil dan lebih memperhatikan kebutuhan pekerja, terutama pekerja berupah rendah dan

pekerja perempuan. Untuk perusahaan yang lebih kecil, penyedia harus beralih ke layanan penggajian yang menyederhanakan proses pembayaran upah dan yang menawarkan metode alternatif untuk model dan kapasitas manajemen SDM yang berbeda. Bagi pekerja, penyedia harus berupaya mengembangkan layanan dan produk dengan biaya yang lebih menarik.

Pekerja, perusahaan, dan penyedia jasa keuangan akan mendapat manfaat dari dukungan pemerintah yang berkelanjutan dalam pembangunan dan regulasi infrastruktur. Pemerintah harus melanjutkan upayanya untuk membangun lingkungan yang kondusif, mengatasi masalah infrastruktur digital, perlindungan konsumen, dan literasi keuangan. Peraturan tentang uang seluler dapat mempromosikan pembayaran upah digital dengan plafon pembayaran yang lebih tinggi dan biaya transaksi yang lebih rendah. Perhatian khusus harus diberikan pada kebijakan yang memperkuat pengaktifan (onboarding) digitalisasi UKM, seperti QRIS dan BI-FAST, mengingat keduanya mungkin merupakan instrumen penting untuk transisi dari pembayaran upah secara tunai ke digital.

Laporan singkat ini berdasarkan kajian cepat upah digital untuk pekerjaan layak di Indonesia, yang dilakukan oleh tim peneliti dari Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial (LPEM-FEB UI) yang terdiri dari Jahen Fachrul Rezki, Faradina Alifia Maizar, Sulistiadi Dono Iskandar, Hamdan Bintara, Nia Kurnia Sholihah, Lovina Aisha Malika Putri, dengan masukan teknis dari Valerie Breda, Mansour Omeira, Tedy Gunawan, Umar Arief dan Andrej Slivnik.

Pusat Global Upah Digital ILO untuk Pekerjaan Layak mempromosikan transisi ke pembayaran upah digital yang bertanggung jawab melalui intervensi multi-negara, penelitian, manajemen pengetahuan, dan advokasi. Pusat Global adalah inisiatif Program Keuangan Sosial ILO.

Rincian kontak

Organisasi Perburuhan Internasional

Route des Morillons 4
CH-1211 Geneva 22
Switzerland

T: +41 22 799 7239
E: digitalwages@ilo.org
www.digitalwages.org

Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste

Menara Thamrin Level 22
Jalan MH Thamrin Kav 3
Jakarta,

Indonesia 10250
T: +62 21 3913112
E: jakarta@ilo.org
ilo.org/jakarta